

## ETIKA KONSELING DALAM KONTEKS LINTAS BUDAYA DAN AGAMA

**Masruri**

Fakultas dakwah dan komunikasi IAIN Mataram.

Email: [masruri143@gmail.com](mailto:masruri143@gmail.com)

### **Abstract**

Religion and culture are two entities have always been inherent in human life as social beings. The synergy between religion and culture in affecting the life order of human becomes a uniqueness part in the plural society, the diversity of religion and culture in a society with each having belief, thought, paradigm, values, and norms. It becomes a challenge for counselors to have competence in the field of cultural skills, in understanding the diversity of cultural values and religion. The urgency of that understanding is to avoid cultural bias and religion between counselor and counselee. Thus, the counselors are required to have a cultural sensitive and to develop tolerant attitude in the diverse of population, especially for counselors who work in educational settings. The diverse problem of religions and cultures become problems, which often appear on the surface, such as the harassment of religious teachings, traditions, gender issues.

**Keyword :** *Counseling Ethics, cross culture and religion*

## A. Pendahuluan

Keberagaman (*diverse*) budaya dan agama dalam suatu masyarakat, menjadi tantangan tersendiri bagi konselor dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling. Menuntut kepekaan (*sensitif*), toleransi, dan responsif konselor memahami perbedaan budaya dan agama konseli, sekaligus menjadi kunci keberhasilan konseling dalam konteks lintas budaya dan agama. Berangkat dari pemahaman utuh konselor mengenai multikulturalisme akan melahirkan rumusan baru dalam etika pelaksanaan proses bimbingan dan konseling. Etika konseling dalam konteks lintas budaya dan agama, dipahami sebagai bentuk pertimbangan sikap konselor kepada konseli upaya menghindari kesalahpahaman dalam memberikan layanan bantuan kepada konseli yang berbeda agama dan budaya. Urgensinya pemahaman keragaman budaya dan agama konseli, sebagai cara konselor memahami prinsip-prinsip, nilai-nilai budaya konseli agar tidak terjadi kesalahpahaman (*misunderstanding*), yang mengakibatkan tanggungjawab etika profesional dapat terciderai. Terutama, bagi konselor yang bekerja di seting pendidikan, keragaman (*divers*) budaya dan agama konseli adalah sebuah tantangan tersendiri untuk dapat memahami

dan menyesuaikan diri, yaitu dengan keterampilan komunikasi verbal dan non verbal yang sifatnya fleksibel dan fluktuatif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ASCA (*American School Counselor Association*) tentang tanggung jawab etika (*ethical responsibility*) dalam konseling lintas budaya yaitu :

The professional school counselor understands the diverse cultural backgrounds of the counselees with whom he/she work. This includes, but is not limited to, learning how the school counselor's own cultural/ethnic/racial identity impacts her or his values and beliefs about the counseling process.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan salah negara yang memiliki aneka ragam budaya dan agama. Berangkat dari sebuah keyakinan bahwa budaya dan agama mempengaruhi cara pandang, pola pikir dan tingkahlaku individu. Untuk itu, selayaknya konselor dalam memahami masalah yang sedang dihadapi oleh konseli, dapat dipahami secara obyektif alias tidak subyektif dan holistik. Sehingga penguasaan konselor mengenai keberagaman budaya yang terdapat dalam masyarakat, sangat menentukan efektifitas layanan konseling. Salah satu sikap tidak etis konselor kepada konseli dalam konteks lintas budaya dan agama adalah memaksakan nilai-

---

<sup>1</sup>Danielt T. Sciarra, *School, Counseling*, (New Zealand: Thomson Learning, 2004), 173.

nilai konselor pada konseli, konversi agama, sikap diskriminasi dan lain-lain.

Untuk menghadapi masalah etika konseling dalam konteks lintas budaya dan agama, maka perlu adanya kode etik profesional yang mengatur sebagai pijakan dalam melaksanakan konseling lintas budaya dan agama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hansen bahwa untuk menghadapi masalah etik, konselor mengembangkan kode etik profesional dan standar tingkah laku “berdasarkan nilai-nilai yang telah disetujui bersama”.<sup>2</sup> Sedangkan Vacc, Juhnke, dan Nielsen mengatakan bahwa kode etik akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien.

## B. Pembahasan

### 1. Memahami Konseling Lintas Budaya

Prosser mengemukakan dalam konseling lintas budaya atau kebudayaan (*culture*) meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan dan berpikir yang telah terpolakan dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta memberikan identitas pada komunitas

pendukungnya. Sedangkan Berry mengatakan bahwa Secara singkat dapat pula diartikan bahwa budaya adalah pandangan hidup sekelompok orang, atau dalam rumusan yang lebih umum adalah “cara kita hidup seperti ini”, *the way we are*, yang diekspresikan dalam cara (sekelompok orang) berpikir, mempersepsikan, menilai, dan bertindak. Kata “sekelompok orang” (*a group of people*) perlu digaris bawahi untuk menunjukkan bahwa budaya selalu menunjukkan pada ciri-ciri yang melekat pada kelompok, tidak pada (seseorang) individu.

Mendefinisikan makna kebudayaan yang mampu mewakili seluruh elemen kebudayaan merupakan perkara yang tidak mudah. Sebagian besar para ahli merumuskan kebudayaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagaimana Pedersen mendefinisikan kebudayaan secara “*variabel etnografik*” seperti etnisitas, kewarganegaraan, agama, dan bahasa, seperti juga *variabel demografik* dari umur, gender, tempat tinggal, dan sebagainya, *variabel status* seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan dan afiliasi atau keanggotaan formal atau informal dalam cakupan luas.

Laporan Willowbank dari Komite Lausanne memberikan definisi berikut mengenai kebudayaan yang menggabungkan kebudayaan

<sup>2</sup>Glaadding T. Samuel, *Konseling : Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), 68.

dengan turunannya, struktur sosial: Kebudayaan adalah suatu sistem terpadu dari kepercayaan-kepercayaan (mengenai Allah, atau kenyataan, atau makna hakiki), dari nilai-nilai (mengenai apa yang benar, baik, indah, dan normatif), dari adat istiadat (bagaimana berperilaku, berhubungan dengan orang lain, berbicara, berpakaian, bekerja, bermain, berdagang, bertani, makan, dan sebagainya), dan dari lembaga-lembaga yang mengungkapkan kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dan adat istiadat ini (pemerintah, hukum, pengadilan, kuil dan gereja, keluarga, sekolah, rumah sakit, pabrik, toko, serikat, klub, dan sebagainya), yang mengikat suatu masyarakat bersama sama dan memberikan kepadanya suatu rasa memiliki jati diri, martabat, keamanan dan kesinambungan.<sup>3</sup>

Adapun yang dimaksud dengan konseling lintas budaya (*cross-cultural counseling*, *counseling across cultures*, *multicultural counseling*) adalah konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya (*cultural biases*) pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak

berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dari segi ini, maka konseling pada dasarnya merupakan sebuah “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien yang dilayaninya. Dalam konteks persekolahan, Yagi mengemukakan:<sup>4</sup>

By developing an awareness of the culturally diverse student population ..., an understanding of cultural variables and values of students from culturally diverse backgrounds, and a repertoire of culturally responsive skills, the school counselor can address cultural issues that affect the development needs of children and youth ... The culturally responsive school counselor uses acquires awareness, knowledge, and skills in multicultural context to meet the academic, career, and personal/social development needs of students from culturally diverse environment.

Seperti halnya pada kajian-kajian lintas-budaya umumnya, pengertian di atas berlaku untuk konseling antar-budaya (*intercultural counseling*), konseling multi-budaya (*multicultural counseling*), atau konseling transbudaya (*transcultural counseling*) yang digunakan secara berganti-ganti dalam berbagai literatur untuk maksud yang

<sup>3</sup>Bernard T. Adeney, *Etika Sosial Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 19.

<sup>4</sup>Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 10.

sama. Disamping itu, dalam berbagai literatur digunakan pula istilah konseling untuk populasi khusus (*counseling for special populations*) dan konseling multi-etnik (*multi-ethnic counseling*), konseling untuk mahasiswa internasional (*counseling for international students*) yang meliputi isu-isu yang sama dengan istilah yang lebih umum: “konseling lintas budaya”.

## 2. Kode Etik Konselor Menyangkut Konseling Lintas Budaya Dan Agama

Menciptakan konseling yang kondusif dalam konteks lintas budaya dan agama, ada baiknya konselor selaku sebagai pemberi layanan, untuk tetap mengevaluasi diri, dengan mengintegrasikan pada kode etik konseling yang berlaku. Pemahaman yang utuh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam konteks konseling lintas budaya dan agama, seperti diskriminasi (perbedaan perlakuan) dan memaksakan nilai-nilai konselor pada konseli merupakan suatu keharusan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa tingkah laku tidak etis yang paling sering terjadi dalam konseling sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Pelanggaran kepercayaan
- b. Melampaui tingkat kompetensi

- profesional seseorang
- c. Kelalaian dalam praktik
- d. Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki
- e. Memaksakan nilai-nilai konselor pada klien
- f. Membuat klien bergantung
- g. Melakukan aktifitas seksual dengan klien
- h. Konflik kepentingan, seperti *hubungan ganda* yaitu peran konselor bercampur dengan hubungan lainnya, baik hubungan pribadi atau hubungan profesional
- i. Persetujuan finansial yang kurang jelas, seperti mengenakan bayaran tambahan
- j. Pengiklanan yang tidak pantas
- k. Plagiarisme

Laju perubahan dan peningkatan masyarakat multikultural, menuntut konselor untuk lebih responsif. Proses konseling dalam konteks lintas budaya sangat rawan terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling berjalan tidak efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan yang responsif secara kultural.

Awal pergerakan perkembangan profesi konseling di Indonesia dimulai

<sup>5</sup> Ibid., 67.

pada setting pendidikan. Keberagaman identitas budaya dan agama siswa dapat mengganggu dan menghambat proses konseling, apabila konselor tidak terampil secara kultural. Mengingat, pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor.

Dengan demikian Monro mengemukakan beberapa pedoman umum yang dapat membantu konselor mengatasi masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup, antara lain :

1. Setiap individu berhak menentukan arah hidupnya
2. Konselor harus jujur pada dirinya sendiri dengan tidak meninggalkan nilai sosial, moral dan agama yang dianutnya. Konselor harus mengenal dirinya sendiri dan mengikuti nilai tersebut secara jujur
3. Tugas konselor adalah membantu konseli mengenal nilai hidupnya serta mengambil keputusan dan menetapkan keputusan dirinya
4. Konselor hendaknya membantu konseli agar dapat menyalurkan pendapat atau sikap mereka melalui cara yang baik. Setelah itu konselor menanggapi secara jujur apakah pendapat dan sikap mereka tepat atau tidak
5. Konselor tidak boleh memaksakan

nilai-nilai yang dianutnya kepada konseli

6. Konselor tidak menentukan sesuatu itu benar atau salah akan tetapi memberikan dorongan agar konseli dapat menilai sendiri sikap, norma dan tindakannya secara obyektif
  7. Konselor jangan mencoakan untuk menghapus kenyataan yang dirasakan konseli dengan menyarakannya tidak memandang tingkahlakunya sebagai penyimpangan
  8. Konselor tidak melakukan konseling dalam pengasingan
  9. Apabila diperkenankan memberikan penilaian, maka penilaian konselor harus mengarah pada tindakan dan bukan kepada konseli.
- Kitchener mengidentifikasi beberapa prinsip etik yang berhubungan dengan aktivitas dan pilihan etik konselor dalam mengimplementasikan konseling lintas budaya yaitu :
- a. Otonomi (*Autonomy*), *This principle addresses one's to self-determination* (memberikan kebebasan dalam memilih dan pengambilan keputusan sendiri).
  - b. *Nonmaleficence*. *This concept entails doing no harm to other* (seorang konselor berinteraksi dengan konseli secara intensional dengan



- tidak mengakibatkan kerugian/ rasa sakit)
- c. perbuatan baik (*Beneficence*) yaitu melakukan yang baik dan mencegah kerugian
  - d. keadilan (*Justice*), *is associated with the idea of fairness.*
  - e. kesetiaan (*Fidelity*), yaitu kesetiaan atau berpegang pada komitmen.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip di atas melibatkan pengambilan keputusan secara sadar selama proses konseling. Khususnya konseling lintas budaya dan agama yang sarat dengan nilai-nilai yang harus dipahami secara utuh oleh konselor. Untuk itu, demi kelancaran proses konseling dalam konteks lintas budaya, maka konselor harus sensitif atau memperhatikan tiga area berikut dalam isu budaya, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Padersen bahwa :

1. Pada pengetahuan akan cara pandang klien yang berbeda budaya.
2. Kepekaan terhadap cara pandang pribadi seseorang dan bagaimana seseorang merupakan produk dari pengkondisian budaya
3. Keahlian yang diperlukan untuk bekerja dengan klien yang berbeda budaya.

---

<sup>6</sup>Courtland C. Lee, *Multicultural Issues In Counseling : New Approaches to Diversity*, (United State : American Counseling Association, 2005), 357.

Memahami secara kritis (*critical contex*) mengenai multikulturalisme dalam menjalankan konseling lintas budaya dan agama membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal pertama yang harus dipahami oleh konselor lintas budaya, terutama sekali berkaitan dengan mawas diri, adalah isu-isu mengenai relativitas budaya. kebudayaan sebagai produk manusia merupakan seperangkat aturan yang tidak hanya mengekang tindakan manusia melainkan juga membuat manusia mampu, dengan cara-cara yang unik, menyusun tindakan yang bermakna bagi sesama mereka. Kebudayaan tentu saja merupakan pembahasan yang terlalu luas untuk dikaji secara parsial. Meski demikian, mengkaji kebudayaan secara utuh bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan sifat budaya sebagai konstruk diferensial menjadikannya terlampaui elusif untuk dikaji melalui kacamata paradigma struktural. Pada masa-masa sebelum revolusi industri mengenali kegelisahan individu dalam setting sosial mereka masih dapat dilakukan tanpa kuatir terjebak dalam bentuk-bentuk generalisasi yang tidak bertanggung jawab

Dinamika kehidupan pada masyarakat multikultural, menggambarkan kompleksitas kebudayaan yang saling berbenturan nilai.

Kebudayaan-kebudayaan dan sub-sub kebudayaan bertumpang tindih. Disamping itu, perbedaan agama dari beragam kelompok masyarakat multikultural yang diyakini memiliki dampak pada pembentukan karakter dan prinsip-prinsip individu maupun kelompok. Peran budaya dan agama yang berbeda pada individu maupun kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya melahirkan perbedaan pada sikap, paradigma, nilai-nilai, norma, adat istiadat, etika, estetika, life style dan lain-lain.

Berangkat dari kompleksitas budaya pada masyarakat multikultural, menuntut setiap orang untuk bisa menyesuaikan diri, menerima segala perbedaan, toleransi tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing individu maupun antar kelompok. Dengan cara itu, maka dibutuhkan setiap individu maupun kelompok untuk lebih sensitif atau responsif terhadap perbedaan budaya. Keterampilan individu untuk lebih responsif secara kultural, menjadi modal awal dalam menciptakan nuansa kondusif antar sesama individu dan kelompok masyarakat. Namun nyatanya, tidak semua individu maupun kelompok mampu hidup berdampingan di tengah-tengah perbedaan budaya tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keragaman

budaya, bahwa sesuatu yang tidak asing lagi, ketika siaran radio, televisi dan media cetak lainnya setiap hari menyuguhkan berita-berita konflik, baik antara suku dan etnis dan lain-lain. Kompleksitas permasalahan yang muncul pada masyarakat multikultural merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi konselor, baik konselor pendidikan, keluarga dan lain-lain untuk menyelesaikan masalah konseli pada konteks lintas budaya.

Tema sentral dalam pembahasan etika konseling dalam konteks lintas budaya dan agama, memfokuskan pada kajian mengenai etika seorang konselor dalam menangani klien/konseli yang berbeda budaya. etika yang dimaksud disini mencakup analisis dan penerapan konsep mengenai baik, buruk, salah, benar dan tanggung jawab. Secara sederhana etika yang dimaksud dalam kajian ini adalah sudut pandang mengenai baik dan buruk, benar dan salah serta tanggung jawab konselor sebagai pemberi layanan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berbeda budaya.

### **1. Model Konseling Lintas Budaya**

Palmer and Laungani mengajukan tiga model konseling lintas budaya, yakni (1) culture centred model, (2)



integrative model, dan (3) ethnomedical model.<sup>7</sup>

a. Model berpusat pada budaya

Palmer and Laungani berpendapat bahwa budaya-budaya barat menekankan individualisme, kognitifisme, bebas, dan materialisme, sedangkan budaya timur menekankan komunalisme, emosionalisme, determinisme, dan spiritualisme. Konsep-konsep ini bersifat kontinum tidak dikhotomus. Pengajuan model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir (*framework*) korespondensi budaya konselor dan konseli. Diyakini, sering kali terjadi ketidaksejajaran antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseli tentang budaya, bahkan dalam budayanya sendiri. Konseli tidak mengerti keyakinan-keyakinan budaya yang fundamental konselornya demikian pula konselor tidak memahami keyakinan-keyakinan budaya konselinya. Atau bahkan keduanya tidak memahami dan tidak mau berbagi keyakinan-keyakinan budaya mereka.

Oleh sebab itu pada model ini budaya menjadi pusat perhatian. Artinya, fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai

budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing.

b. Model Integrative (*integrative model*)

Berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika, Jones merumuskan empat kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut :

1. Reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial (*reactions to racial oppression*).
2. Pengaruh budaya mayoritas (*influence of the majority culture*).
3. Reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial (*reactions to racial oppression*).
4. Pengaruh budaya mayoritas (*influence of the majority culture*).

Menurut Jones pada kenyataannya sungguh sulit untuk memisahkan pengaruh semua kelas variabel tersebut. Menurutnya, yang menjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman-pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi.

<sup>7</sup>Palmer, Stephen & Laungani, Pittu. *Counseling in a Multicultural Society*, (London : Sage Publisher, 2008), 97-109.

Budaya tradisional yang dimaksud adalah segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang baik secara disadari ataupun tidak. Yang tidak disadari termasuk apa yang diungkapkan Jung dengan istilah *collective unconscious* (ketidaksadaran kolektif), yakni nilai-nilai budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan mengases nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel di atas.

c. Model Etnomedikal

Model etnomedikal pertama kali diajukan oleh Ahmed dan Fraser yang dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Alladin. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan sembilan model dimensional sebagai kerangka pikirnya

1. Konsepsi sakit (sickness conception)
  - a. Melakukan penyimpangan norma-norma budaya
  - b. Melanggar batas-batas keyakinan agama dan berdosa
  - c. Melakukan pelanggaran

hukum

- d. Mengalami masalah interpersonal

2. Causal/healing beliefs

- a. Menjelaskan model healing yang dilakukan dalam konseling
- b. Mengembangkan pendekatan yang cocok dengan keyakinan konseli
- c. Menjadikan keyakinan konseli sebagai hal familiar bagi konselor
- d. Menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai budaya perlu berbagi (share) tentang keyakinan yang sama

3. Kriteria sehat (*wellbeing criteria*)

Pribadi yang sehat adalah seseorang yang harmonis antara dirinya sendiri dengan alamnya. Artinya, fungsi-fungsi pribadinya adaptif dan secara penuh dapat melakukan aturan-aturan sosial dalam komunitasnya.

- a. Mampu menentukan sehat dan sakit
- b. Memahami permasalahan sesuai dengan konteks
- c. Mampu memecahkan ketidakberfungsian interpersonal
- d. Menyadari dan memahami budayanya sendiri

4. Body Function Belief

Perspektif budaya berkembang dalam kerangka pikir lebih bermakna Sosial dan okupasi konseli semakin membaik dalam kehidupan sehari-hari Muncul intrapsikis yang efektif pada diri konseli

#### 5. Health practice efficacy beliefs

Ini merupakan implemetasi pemecahan masalah dengan pengarahan atas keyakinan-keyakinan yang sehat dari konseli.

Model-model konseling lintas budaya di atas, dapat dijadikan sebagai pedoman konselor dalam mengimplementasikan konseling pada populasi yang beragam secara kebudayaan. Di sisi lain, terdapat ada tiga pendekatan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yaitu :

1. Pendekatan universal atau etik, yaitu suatu pendekatan yang menekankan kepada inklusivitas, komonalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok.
2. Pendekatan emik (kekhususan budaya), yaitu suatu pendekatan yang memfokuskan pada karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling mereka.
3. Pendekatan transcultural, yaitu suatupendekatanyangmenekankan bahwa keterlibatan dalam konseling

merupakan proses yang aktif dan resiprokal.<sup>8</sup>

### C. Penutup

Salah satu kompetensi konselor profesional di bidang akademik adalah mengetahui secara mendalam konseli yang hendak dilayani.<sup>9</sup> Untuk dapat mengetahui kondisi psikologis dan kondisi sosio cultural konseli dibutuhkan instrument untuk menggali data psikologis dan data latar belakang (background) budaya konseli. Data-data tersebut sebagai alat untuk memahami sekaligus sebagai langkah awal dalam penentuan treatmen. Ketepatan treatmen sangat bergantung dari ketepatan dalam melakukan asesmen terhadap konseli. Sehingga, semakin baik konselor dalam menilai kebutuhan maupun permasalahan konseli maka semakin baik pula pelaksanaan konseling dan hasil yang akan dicapai.

Efektifitas konseling dalam nuansa keragaman budaya, baik antar konseli dengan konselor maupun antar sesama konseli (konseling teman sebaya) akan

---

<sup>8</sup>Mamat supriatna, *Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi : Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 169.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, (Jakarta : Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 38-39.

berjalan kondusif apabila individu dapat saling menghargai terhadap keragamannilai-nilaiyangmelekatpada masing-masing individu. Kemampuan untuk dapat saling menghargai mensyaratkan adanya kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang masing-masing budaya

yang dibawa individu. Akan tetapi sebaliknya, apabila individu meyakini adanya superioritas-inferioritas, atau mayoritas-minoritas budaya maka akan rentan terjadinya asimilasi, diskriminasi dan pemaksanaan (intervensi) nilai pada individu yang tergolong inferior maupun minor dalam konteks budaya.

### Daftar Pustaka

- Adeney, T., Bernard, *Etika Sosial Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007)
- Lee, C., Courtland, *Multicultural Issues In Counseling : New Approaches To Diversity*, (United State: American Counseling Association, 2005)
- Palmer, Stephen & Laungani, Pittu. *Counseling in a Multicultural Society*, (London: Sage Publisher, 2008)
- Samuel, Gladding, T., *Konseling : Profesi Yang Menyeluruh*, (Jakarta: PT Indeks, 2012)
- Sciarra, Danielt, T., *School Counseling*, (New Zealand: Thomson Learning, 2004)
- Supriatna, Mamat, *Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)